



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DKI Siapkan Rp 5,8 Triliun untuk Rumah DP Nol Rupiah

Status dana talangan masih dipersoalkan.

Linda Hairani

[linda.hairani@tempo.co.id](mailto:linda.hairani@tempo.co.id)

**JAKARTA** Pemerintah DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 5,8 triliun untuk program hunian murah alias *down payment* (DP) nol rupiah. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pos dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 itu akan digunakan untuk talangan uang muka dan likuiditas pembiayaan kredit perumahan. "Namanya Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah," kata dia, kemarin.

Saefullah menjelaskan, dana Rp 5,8 triliun antara lain dijatahkan untuk menalangi 20 persen uang muka kredit rumah DP nol rupiah. Alokasinya maksimal Rp 90 juta per unit rumah. Dana talangan uang muka untuk 2.500 unit rumah harus dikembalikan bersama pembayaran cicilan kredit.

Adapun komponen bantuan likuiditas pembiayaan kredit perumahan, menurut Saefullah, maksimal Rp 300 juta per unit hunian. Pemerintah DKI menyediakan dana bantuan likuiditas untuk 7.500 unit rumah. Kelak, Unit Pelaksana Teknis Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera Dinas Pertanahan dan Kawasan Permukiman yang akan menyulurkan dana tersebut.

Kepala Unit Pelaksana



Warga melihat lokasi pembangunan Klapa Village, di Jakarta Timur, Januari lalu.

Teknis Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera, Dzikiran Kurniswan, mengatakan bantuan likuiditas pembiayaan kredit perumahan merupakan intervensi pemerintah. Sebab, suku bunga kreditnya di bawah 5 persen. "Kalau tak ada intervensi, perbankan tak mau," kata dia.

Menurut Dzikiran, ada dua opsi mekanisme penyaluran bantuan likuiditas pembiayaan tersebut. Opsi pertama perbankan berfungsi sebagai lembaga penyalur. Opsi berikutnya, penyaluran bantuan likuiditas melibatkan pemerintah dan perbankan. Pemerintah DKI, kata dia, masih membahas opsi yang paling menguntungkan bagi masyarakat.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia

Corruption Watch, Firdaus Ilyas, mengatakan alokasi dana talangan dari pemerintah DKI untuk masyarakat berpotensi mendatangkan masalah pada kemudian hari. Sebab, usia pemerintahan hanya lima tahun. Sedangkan tenor kredit 15-20 tahun. "Belum lagi potensi kredit macet setelah pemerintahan lima tahun berakhir," kata dia.

Tak cuma soal tenor pinjaman, menurut Firdaus, pemerintah daerah dilarang mengucurkan dana talangan atas pinjaman pihak lain. Larangan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah. Pasal 5 ayat 2 pada aturan itu menyebutkan pendapatan daerah atau aset milik daerah tidak dijadikan jaminan pinjam-

an.

Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Santoso, mengatakan hal senada. Menurut dia, pemerintah daerah dilarang mengelola dana talangan uang muka. Alternatifnya, anggaran itu dialihkan ke badan usaha milik daerah sebagai penyerapan modal. "Lalu penggunaannya diatur lewat skema pengembang bisnis," kata dia.

Demikian memperjelas persoalan dana talangan itu, Komisi Keuangan DPRD bakal mengundang perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Bank Indonesia dalam pembahasan Rancangan APBD 2019. "Kami ingin paham dulu sebelum memutuskan usulan alokasi itu," kata dia. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# DKI Siapkan Rp 5,8 Triliun untuk Rumah DP Nol Rupiah

## Rp 350 Juta per Unit

Harian di rumah susun program *down payment* (DP) atau uang muka nol rupiah bakal dilga seharga Rp 350 juta per unit. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022, program tersebut untuk masyarakat berpenghasilan Rp 4-7 juta per bulan.

■ **Target pembangunan dalam lima tahun**

- » Dibangun oleh BUMD sebanyak 9.772 unit.
- » Dibangun oleh pemerintah dan BUMD atau mekanisme pasar 225.664 unit.

■ **Dukungan uang muka Rp 2,65 triliun per tahun**

- » APBD 2018 Perubahan Rp 717 miliar
- » Rancangan APBD 2019 Rp 3,8 triliun

■ **Persentase uang muka 15 persen**

■ **Harga per unit Rp 350 juta**

■ **Tantangan**

1. Pengadaan lahan
  - » Bisa dari kewajiban pihak ketiga, nanti dicatat sebagai aset milik badan usaha milik daerah.
  - » Kerja sama bisnis.
  - » Penyedia lahan pemerintah pusat, DKI Jakarta, BUMN, BUMD, dan swasta.
2. Menyediakan dukungan pinjaman uang muka dari anggaran daerah.
3. Mengelola rumah-rumah yang pemiliknya gagal bayar.
4. Mengintegrasikan data kependudukan dan pemajakan sebagai dasar verifikasi calon pembeli.

■ **Tugas badan layanan umum daerah (BLUD) pelaksana program DP nol rupiah:**

1. Memenuhi kebutuhan perumahan rakyat
2. Memastikan lahan yang akan digunakan tidak bermasalah.
3. Mengelola rumah-rumah yang pemiliknya mengalami gagal bayar.
4. Menjual atau menyewakan aset berbentuk rumah di bawah pengelolaan BLUD.

■ **Perkiraan anggaran operasional BLUD (miliar):**

